

**EVALUASI PERAN MGMP DI DAERAH TERPENCIL DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS GURU MELALUI PENYUSUNAN SOAL USBN
(Studi Kasus Di Kabupaten Flores Timur (Flotim)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT))¹**

***EVALUATION OF THE ROLE OF MGMP IN REMOTE AREAS IN
IMPROVING THE QUALITY OF TEACHERS THROUGH
WRITING OF EXAM QUESTIONS
(Case Study in East Flores District, East Nusa Tenggara Province)***

Simon Sili Sabon

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
e-mail : simonsilisabon@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah mencari solusi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemberdayaan MGMP sehingga mampu meningkatkan kualitas guru khususnya di daerah terpencil. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kajian akan melakukan: (i) mengetahui profil dan keaktifan MGMP khususnya penyusun soal USBN, (ii) mengetahui perencanaan kegiatan oleh MGMP; (iii) mengetahui realisasi perencanaan kegiatan oleh MGMP, (iv) mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan MGMP, (v) mengetahui diseminasi hasil kegiatan, (vi) mengetahui transfer/pembelajaran hasil kegiatan kepada peserta didik, dan (vii) mengidentifikasi praktik baik penyelenggaraan MGMP yang dapat dicontoh di daerah lain. Pendekatan kajian ini adalah evaluasi. Kajian ini mengevaluasi pelaksanaan salah satu kegiatan MGMP yaitu penyusunan soal USBN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan di Kabupaten Flotim melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner oleh 10 orang ketua MGMP Mapel K-13. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa (i) umumnya MGMP penyusun soal USBN memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan *block grant* karena semua MGMP memiliki susunan organisasi sesuai ketentuan yaitu minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara; namun sebagian besar tidak memenuhi persyaratan lainnya yaitu mengadakan 12 kali kegiatan dalam tahun sebelumnya, (ii) sejumlah besar MGMP tidak membuat perencanaan kegiatan, (iii) tidak semua MGMP yang membuat perencanaan kegiatan merealisasikan perencanaannya, (iv) hasil kegiatan adalah sekumpulan soal-soal aras tinggi, hanya saja guru-guru tidak yakin bahwa soal-soal yang disusunnya tersebut merupakan soal aras tinggi karena tidak ada langkah validasi dan verifikasi oleh tim ahli, (v) diseminasi hasil kegiatan merupakan langkah yang sangat penting namun tidak maksimal dilakukan karena tidak terjadwal, (vi) pembelajaran/transfer hasil kegiatan kepada peserta didik juga tidak maksimal dilakukan karena tidak terjadwal dalam perencanaan kegiatan, dan (vii) ada praktik baik penyelenggaraan MGMP di Flotim yang dapat dicontoh yaitu cara membiayai kegiatan MGMP dan strategi pembentukan MGMP untuk menekan biaya transportasi dan untuk penghematan waktu.

¹ Kajian ini merupakan bagian dari studi “Kajian Optimalisasi Peran MGMP Dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar Guru” di Puslitjakkidbud tahun 2018.

Kata kunci: Kualitas Guru, MGMP, Soal USBN, Daerah Terpencil

ABSTRACT

The purpose of this study is to find a solution that can be used to maximize the empowerment of MGMP so that it can improve the quality of teachers, especially in remote areas. To achieve these objectives, the study will do: (i) find out the profile and activeness of the MGMP, especially the compiler of the USBN questions, (ii) know the planning of activities by the MGMP; (iii) knowing the realization of activity planning by the MGMP, (iv) knowing the results of MGMP activities, (v) knowing the dissemination of the results of activities, (vi) knowing the transfer / learning outcomes of activities to students, and (vii) identifying good practices of MGMP which can be emulated in other regions. The approach of this study is evaluation. This study evaluates the implementation of one of the MGMP activities, namely the preparation of USBN questions. The data used in this study are primary data collected in East Flores District through the Focus Group Discussion (FGD) and filling in the questionnaire by 10 people chairing MGMP of the K-13 lessons. Data were analyzed by descriptive statistical techniques. The study concluded that (i) generally the MGMPs composing the USBN issue fulfilled the requirements stipulated as recipients of block grant because all MGMPs had an organizational structure in accordance with the provisions, which consisted of a minimum of a chairman, secretary and treasurer; but most of them did not fulfill the other requirements, namely holding 12 activities in the previous year, (ii) a large number of MGMPs have not planned its activities, (iii) not all MGMPs who have planned activities realized their plans, (iv) activity results were a set of high order thinking skills (HOTS) questions, but the teachers are not sure that the questions they have composed are HOTS' questions because there is no validation and verification step by the expert team, (v) the dissemination of the results of the activities is a very important step but is not done optimally because it is not scheduled, (vi) learning / transfer of the results of activities to students is not optimal either because it is not scheduled in planning activities, and (vii) there are good practices for MGMP implementation in East Flores District that can be emulated, namely how to finance MGMP activities and MGMP formation strategies to reduce costs of transportation and time saving.

Keywords: Teacher's Quality, MGMP, USBN Questions, Remote Area

PENDAHULUAN

MGMP merupakan singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berperan sebagai wadah guru untuk saling bertukar informasi tentang pembelajaran. Mulyasa dalam Husna F. (2016) mendefinisikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai salah satu wadah yang dimanfaatkan guru bidang studi sejenis untuk pengembangan diri. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,

guru berkewajiban melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui kegiatan kolektif guru. Oleh karena MGMP merupakan salah satu wadah atau forum kegiatan kolektif guru, maka melalui kegiatan di MGMP guru dapat meningkatkan profesionalitasnya. Guru yang mengikuti MGMP akan bersama-sama belajar mengembangkan kompetensi. Dalam forum tersebut, guru saling memberi masukan bagaimana membuat administrasi yang benar, pembuatan soal, dan program pengembangan diri lainnya yang bermanfaat

seperti bertukar informasi seputar profesi guru. Secara garis besar, tujuan pendirian MGMP adalah untuk menambah pengetahuan guru dalam mempersiapkan pembelajaran, membantu guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah, sebagai tempat berbagi pengalaman antarguru. Dengan demikian, MGMP merupakan media peningkatan kompetensi guru yang murah meriah. Ini tentunya dibandingkan dengan pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang pastinya membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu maka MGMP sangat perlu untuk didayagunakan.

Dalam paragraf terdahulu disebutkan bahwa MGMP merupakan media yang dapat diandalkan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Di daerah terpencil tentunya MGMP akan sangat bermanfaat karena kompetensi guru-guru di daerah ini umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata nasional sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Tabel berikut menyajikan rerata nilai UKG beberapa kabupaten/kota di daerah terpencil.

Tabel 1. Nilai UKG 2015 guru SMP di Beberapa Kabupaten Terpencil Kepulauan

| Kabupaten | Nilai UKG 2015 | | |
|---------------------------------|----------------|---------|-------------|
| | rerata | N | St. deviasi |
| Flotim NTT | 56,29 | 532 | 12,13 |
| Maluku Tengah, Maluku | 48,81 | 1.039 | 11,73 |
| Kepulauan Morotai, Maluku Utara | 48,64 | 73 | 12,23 |
| Kepulauan Talaud, Sulut | 51,54 | 345 | 12,96 |
| Indonesia | 59,48 | 411.452 | 14,30 |

Sumber: Diolah dari Data UKG 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa rerata kompetensi guru SMP di kabupaten terpencil kepulauan lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata nasional karena umumnya masih di bawah rerata nilai UKG nasional. Selain itu jika dibandingkan dengan standar kelulusan minimum untuk UKG 2015 yang ditetapkan Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu sebesar 55,0 sebagaimana disampaikan oleh Hermanto R. dan Santika S. (2016), maka tentunya banyak guru yang mengajar di kabupaten kepulauan tidak lulus UKG 2015.

Pembangunan pendidikan di daerah terpencil memang mengalami banyak kendala khususnya mengenai kualitas guru. Hal ini disampaikan Suardi F. (2016) yang mengungkapkan bahwa masalah yang banyak menyita perhatian dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah terpencil adalah masalah kualitas guru. Hambatan ini dipicu oleh masalah minimnya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di daerah terpencil, sebagaimana disampaikan oleh A'ing A. (2015) dalam kajiannya tentang "Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan" bahwa masih banyak sekolah belum memiliki sarana pendidikan seperti perpustakaan, rumah dinas guru dan gedung sekolah yang layak. Selain itu, sistem perekrutan guru juga kurang baik sebagaimana disampaikan Rahayu M. dkk. (2018) yang menyebabkan rendahnya kualitas guru.

Dari informasi-informasi yang ada diketahui dengan jelas bahwa kualitas guru yang mengajar di daerah terpencil masih rendah. Untuk itu pemerintah perlu mencari cara yang mampu meningkatkan kualitas

guru khususnya di daerah terpencil. Selama ini cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui pendidikan dan pelatihan, namun cara ini membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan waktu yang lama karena besarnya jumlah guru. Untuk itu perlu dicarikan cara yang murah yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk meningkatkan kualitas guru.

Pemerintah sudah menyadari betul bahwa MGMP benar-benar menawarkan solusi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi guru dan sekaligus meningkatkan kinerja guru terbukti dari adanya penugasan dan bantuan pemerintah kepada MGMP pada tahun 2017 agar MGMP dapat menyusun soal Ujian Sekolah Bertaraf Nasional (USBN). Tentang ini Idhom A. M. (2017) menulis bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memberikan bantuan kepada MGMP untuk menyusun soal USBN. Bantuan ini sengaja diberikan agar sekolah dapat mempersiapkan siswanya untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk itu maka agar lebih fokus untuk mendeskripsikan berhasil tidaknya MGMP menjadi lembaga yang pantas diandalkan untuk membantu meningkatkan kompetensi guru, maka kajian ini akan melakukan evaluasi terhadap program penyusunan USBN oleh MGMP pada tahun 2017.

Dari informasi-informasi di atas dapat dilihat bahwa MGMP menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas guru. Namun demikian pada kenyataannya banyak MGMP di berbagai daerah belum berjalan efektif sebagaimana dituturkan oleh Pengamat pendidikan Prof Arief Rachman (Awaliyah G., 2018a). Diutarakan bahwa

ada dua kategori faktor yang menyebabkan forum MGMP tidak berjalan secara maksimal yaitu faktor internal yang muncul dari masing-masing guru dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, hubungan dengan pemerintah daerah maupun pusat. Awaliyah G. (2018b) juga mengutip pernyataan Pengamat pendidikan lainnya yang sekaligus menjabat Direktur Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD) Eka Simanjuntak yang menuturkan bahwa banyak MGMP tidak beroperasi secara profesional. Kebanyakan MGMP di daerah hanya kumpul-kumpul tidak jelas. Selain itu dikutip pula penuturan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli yang juga menyatakan hal yang sama bahwa banyak MGMP tidak beroperasi secara profesional. Menurut Muhammad Ramli, salah satu faktor tidak efektifnya MGMP disebabkan karena selama ini pemerintah terlalu memanjakan MGMP, terutama terkait soal anggaran sehingga bergerak atau tidaknya MGMP sangat tergantung anggaran dan banyak MGMP tidak berorientasi pada hasil tetapi hanya sekedar berkumpul (Awaliyah G., 2018c). Dari uraian ini dirumuskan permasalahan dari kajian ini bahwa MGMP di daerah terpencil belum mampu berperan untuk meningkatkan kualitas guru secara berkesinambungan

Tujuan dan Lingkup

Bertolak dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan umum kajian ini adalah mencari cara/jalan atau solusi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemberdayaan MGMP sehingga mampu meningkatkan kualitas guru khususnya di daerah terpencil. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka kajian akan melakukan:

1. Mengetahui profil dan keaktifan MGMP penyusun soal USBN
2. Mengetahui perencanaan kegiatan oleh MGMP
3. Mengetahui realisasi perencanaan kegiatan oleh MGMP
4. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan MGMP
5. Mengetahui diseminasi hasil kegiatan MGMP
6. Mengetahui transfer hasil kegiatan kepada peserta didik
7. Mengidentifikasi praktik baik penyelenggaraan MGMP yang dapat dicontoh di daerah lain

Lingkup kajian ini adalah MGMP semua mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 (K-13) yang dibentuk secara resmi oleh dinas pendidikan setempat untuk menjadi wadah atau forum peningkatan profesionalisme guru SMP dan menerima tugas menyusun soal USBN. Sedangkan kajian ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah serta bagi guru sebagai objek yang diteliti. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah: Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota: memperoleh saran-saran untuk pembuatan kebijakan terkait peningkatan peran MGMP atau pemberdayaan MGMP dalam meningkatkan kualitas guru.

Profesionalisme Guru

Suharso (2013) menyampaikan bahwa guru adalah suatu profesi yang sedang tumbuh. Profesionalisasi guru sebagai profesi merupakan hal yang tidak perlu ditawarkan lagi karena guru suatu profesi yang

unik. Profesi guru harus memiliki berbagai kompetensi dan minimal empat kompetensi yaitu profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Seorang guru dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, *independent* (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Pengembangan wawasan dapat dilakukan melalui forum pertemuan profesi, pelatihan ataupun upaya pengembangan dan belajar secara mandiri. Untuk itu maka Suharso menegaskan bahwa seorang guru harus terus meningkatkan profesionalitasnya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*).

Cara-cara Peningkatan Kompetensi/ Profesionalisme Guru

Berangkat dari makna dan syarat-syarat profesi sebagaimana dijelaskan Suharso (2013) pada bagian terdahulu, maka dalam rangka pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan

berbagai strategi antara lain: (i) berpartisipasi di dalam pelatihan atau *in service training* yaitu bentuk pelatihan yang fokusnya adalah keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Pelatihan ini cocok dilaksanakan pada salah satu bentuk pelatihan *pre-service* atau *in-service*. Model pelatihan ini berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional, karena penekanannya lebih kepada evaluasi *performance* nyata suatu kompetensi tertentu dari peserta pelatihan; (ii) membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya. Dengan membaca dan memahami banyak jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan yang terkait dengan profesi guru, maka guru dengan sendirinya dapat mengembangkan profesionalisme dirinya; (iii) berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran (*up to date*) hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama dari kegiatan pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu; (iv) melakukan penelitian seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang merupakan studi sistematis yang dilakukan guru melalui kerja sama atau tidak dengan guru lain dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas guru; (v) partisipasi di dalam organisasi/komunitas profesional. Ikut serta menjadi anggota organisasi profesional juga akan meningkatkan profesionalitas seorang guru. Organisasi profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan

dan memelihara profesionalitasnya dengan membangun hubungan erat dengan masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga; (vi) kerja sama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah. Seseorang cenderung untuk berpikir dari pada keluar untuk memperoleh pertolongan atau informasi mutakhir akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan orang-orang di dalam tempat kerja yang sama (termasuk belajar dari rekan atau teman sejawat). Pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah dengan kepala sekolah, orangtua peserta didik (komite sekolah), guru dan staf lain yang profesional dapat menolong guru dalam memutakhirkan pengetahuannya.

Yunus M. (2016) mengutarakan terdapat tujuh strategi yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya yaitu: (i) belajar sendiri di rumah; (ii) belajar di perpustakaan; (iii) membentuk persatuan pendidik sebidang studi; (iv) mengikuti pertemuan ilmiah; (v) belajar secara formal di lembaga pendidikan; (vi) mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan; dan (vii) mengikuti kompetisi ilmiah. Cara peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang hampir sama disampaikan oleh Ridwan (2014) bahwa guru dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya di dalam proses belajar mengajar dengan cara: (i) mengikuti

musyawarah guru bidang studi (MGBS), (ii) mengikuti penataran, (iii) mengikuti seminar, (iv) dengan cara berdiskusi; serta (v) memanfaatkan media cetak atau media masa.

Dari penjelasan di atas dapat disimak bahwa terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh guru untuk meningkatkan kompetensi atau profesionalismenya. Semua cara-cara tersebut tentunya dapat dilakukan guru, namun cara yang paling tepat menurut penulis adalah belajar dari teman sejawat baik dalam mengikuti kegiatan MGMP eksternal sebagaimana disebutkan Suharso (2013) yaitu berpartisipasi di dalam organisasi/komunitas profesional; atau yang disampaikan oleh Yunus M. (2016) yaitu mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan; atau yang disampaikan Ridwan (2014) yaitu dengan mengikuti Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS). Selain itu guru juga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dengan mengikuti kegiatan MGMP internal guru sebagaimana disampaikan Suharso (2013) yaitu dengan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah.

MGMP dan Pengelolaannya

Sebelumnya telah disampaikan bahwa MGMP merupakan forum/wadah yang dimanfaatkan guru bidang studi sejenis untuk pengembangan diri. Saat ini hampir semua guru bidang studi di setiap kota/kabupaten sepakat mendirikan dan mengikuti MGMP. Organisasi tersebut telah berjalan dan memiliki program-program. Dalam perkembangan yang semakin pesat, guru-guru telah sadar bahwa pengembangan diri dan wawasan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bekal menjalankan tugasnya.

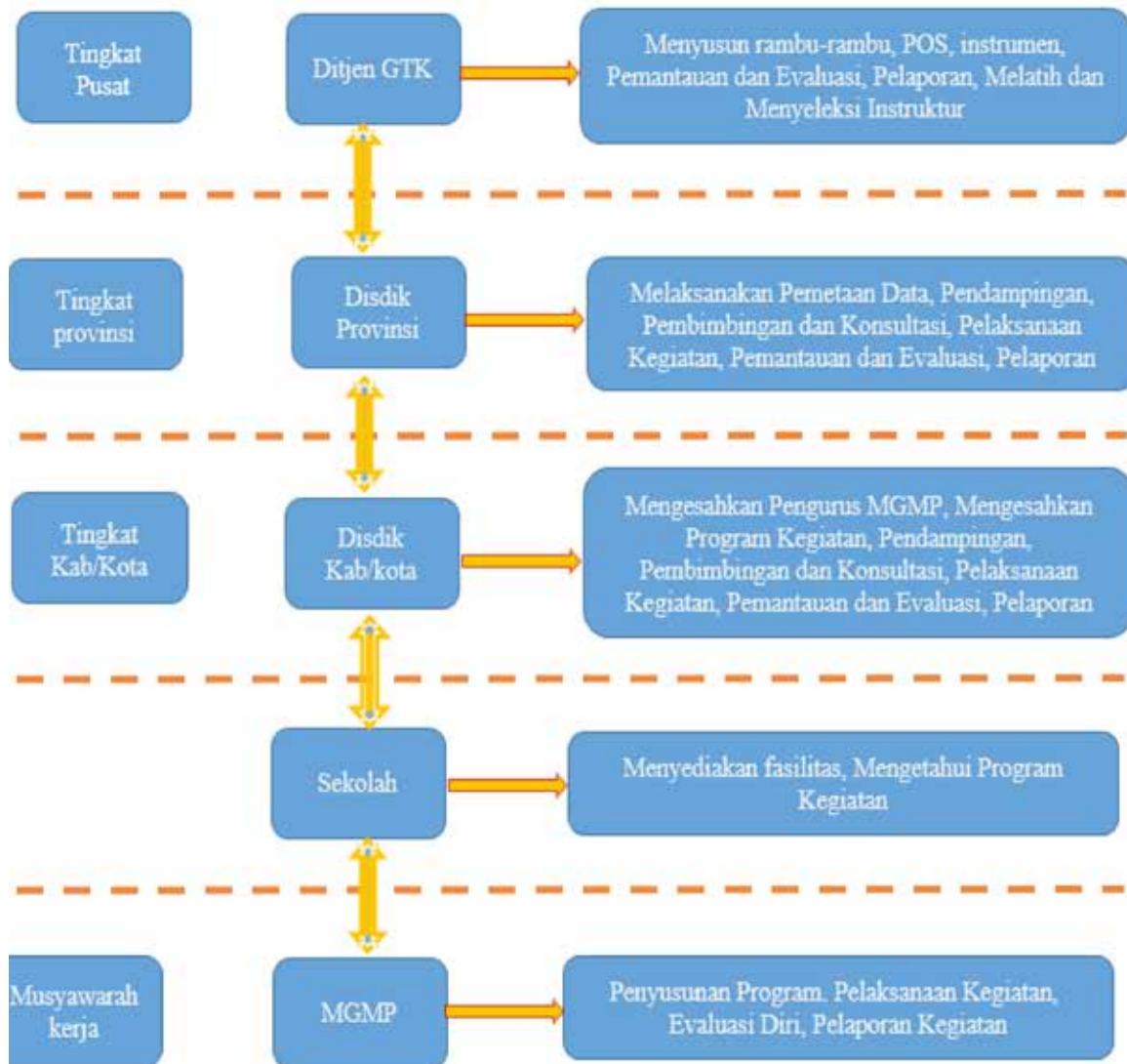
Firman (2016) menjelaskan MGMP adalah forum/wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran. Organisasi tersebut dibentuk sebagai forum pertemuan para guru mata pelajaran, selain itu juga sebagai sarana silaturahmi serta sebagai organisasi yang menampung berbagai gagasan para guru dan juga sebagai sarana menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya pembentukan MGMP di dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh guru di satuan pendidikan masing-masing. Melalui MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran serta MGMP dalam proses peningkatan kinerja guru, dituntut untuk melakukan berbagai terobosan yang akan membangun pendidikan berkualitas.

Dari defenisi MGMP yang ada dirumuskan defenisi MGMP dalam kajian ini sebagai berikut. MGMP merupakan singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berperan sebagai wadah/forum bagi guru untuk saling bertukar informasi tentang pembelajaran. Biasanya informasi yang dibicarakan dalam kegiatan MGMP tersebut mengenai perihal pengembangan kurikulum, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bahkan mengenai solusi untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran sesuai kondisi masing-masing sekolah.

Lembaga MGMP ini bersifat non struktural namun memiliki struktur yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai sekolah

(Yunusshofa dalam Mahmud I. (2013). Berikut ini disajikan Diagram Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan MGMP, yang dimodifikasi dari bagan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan MGMP yang disusun Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), 2010.

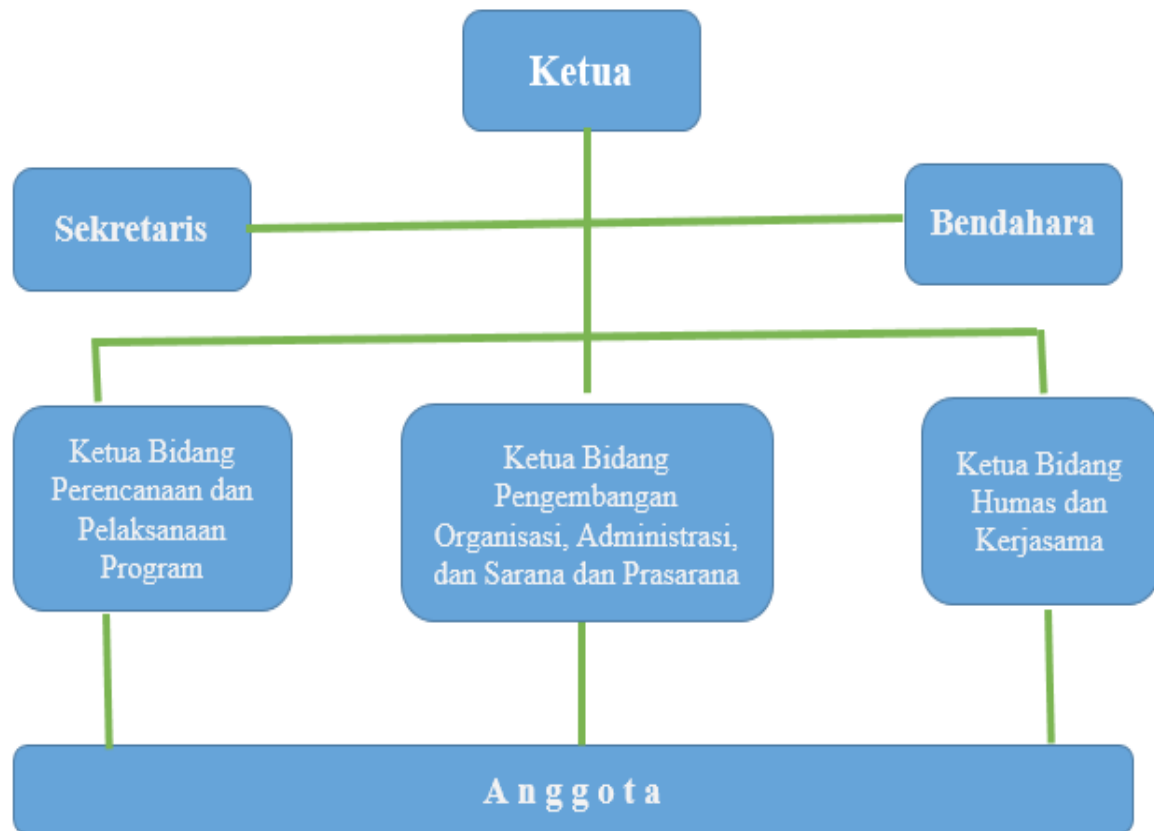
perlu memiliki sebuah struktur organisasi yang jelas. MGMP diharapkan memiliki kepengurusan yang terdiri atas minimal ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam POS Penyelenggaraan MGMP (Ditjen PMPTK, 2010) dihimbau agar MGMP perlu memiliki suatu struktur organisasi sebagaimana disajikan dalam gambar berikut. Struktur organisasi ini dapat dibentuk dengan



Gambar 1. Diagram Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan MGMP

Dari diagram di atas dapat dilihat tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan MGMP. Selanjutnya MGMP sebagai suatu lembaga

kepengurusan seperti tampak pada bagan namun tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan MGMP



Gambar 2. Struktur Organisasi MGMP

Dalam POS (Ditjen PMPTK, 2010) disebutkan bahwa MGMP minimal melaksanakan kegiatannya sekali sebulan sehingga dalam setahun terdapat 12 kegiatan. Kegiatan tersebut direncanakan pada awal tahun ajaran. Cara merencanakan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun program. Program tersebut terdiri dari antara lain program bulanan. Program bulanan dirinci untuk setiap bulan (dalam satu tahun). Dengan demikian, maka jika MGMP tidak membuat rencana kegiatan maka dikatakan bahwa MGMP tersebut tidak aktif.

Daerah Terpencil

Fatah (2018) memberikan definisi Daerah Terpencil merupakan kawasan yang

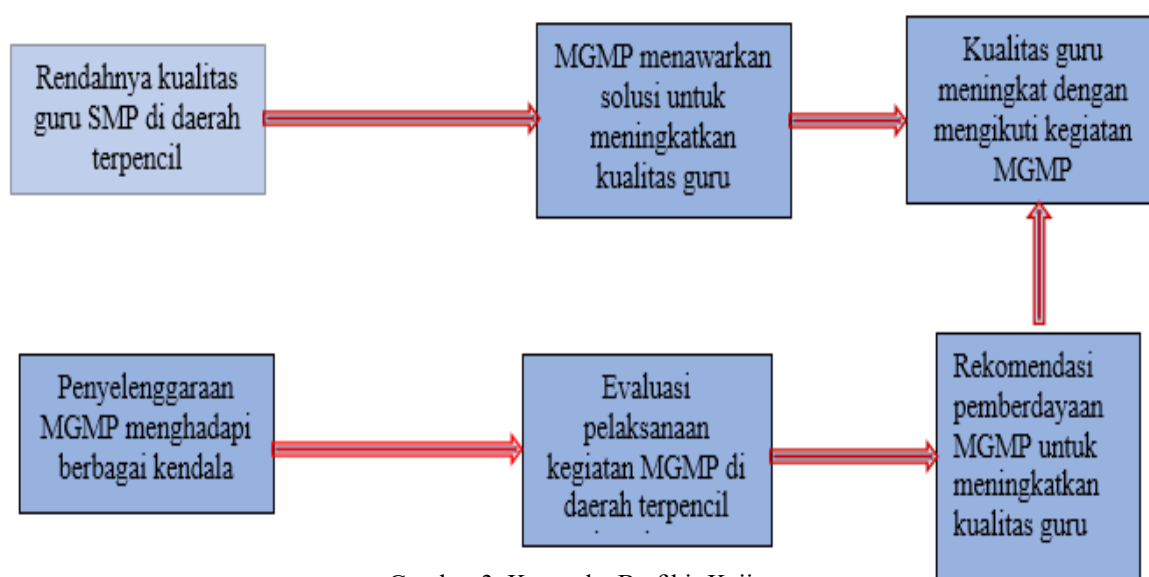
terisolasi dari pusat pertumbuhan atau daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kawasan. Atas dasar definisi yang ditetapkan ini, kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) daerah terpencil dalam kajian ini yaitu: a) daerah perdesaan (unit administratif desa), b) sarana atau infrastruktur aksesibilitas kurang atau tidak ada, c) secara geografis jauh dari pusat pertumbuhan, d) ada isolasi geografis yang memisahkan dari daerah lain. Berdasarkan simulasi terhadap penilaian kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dirumuskan ada 3 tipe daerah terpencil yaitu: (i) tipe A (terpencil karena ketiadaan sarana aksesibilitas): kawasan terpencil yang terisolasi oleh karena tidak tersedianya sarana

aksesibilitas yang menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat pertumbuhan, (ii) tipe B (terpencil karena jarak): kawasan terpencil yang terisolasi oleh karena secara geografis jaraknya jauh dari pusat pertumbuhan, dan (iii) tipe C (terpencil karena isolasi geografis) kawasan terpencil yang terisolasi oleh karena keberadaan isolasi geografis yang memisahkan kawasan tersebut dengan pusat pertumbuhan.

Selanjutnya Senewe F.P. dan Elsi E. (2014) menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan dan Terpencil (DTPK-T). Prioritas pembangunan ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan nasional (nawa cita 3) kabinet Jokowi JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Disebutkannya bahwa prioritas pembangunan ini lebih banyak diarahkan pada kawasan timur Indonesia karena di kawasan ini masih banyak kabupaten yang termasuk dalam

kategori tertinggal, perbatasan, kepulauan dan terpencil. Disampaikannya pula bahwa menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab antara lain faktor geografis; daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi atau jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam kajian ini defenisi daerah terpencil yang digunakan adalah perpaduan defenisi yang disampaikan baik oleh Fatah maupun oleh Senewe F.P. dan Elsi E. yaitu daerah terpencil tipe B yaitu terpencil karena jarak yaitu relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pulau-pulau terpencil sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi atau jangkauan pelayanan kesehatan.

Kerangka Berfikir Kajian



Gambar 3. Kerangka Berfikir Kajian

Metode Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah evaluasi. Kajian ini mengevaluasi pelaksanaan salah satu kegiatan MGMP yaitu penyusunan soal USBN. Populasi kajian ini adalah seluruh MGMP mata pelajaran K-13 di SMP di daerah terpencil yang mendapat tugas dari dinas pendidikan setempat menyusun soal USBN untuk tahun ajaran 2017/2018. Idhom A.M. (2017) menulis bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 sekolah mengadakan USBN untuk semua mata pelajaran K-13 di SMP yang 75 persen soalnya disusun oleh MGMP masing-masing Mapel. Kajian ini memilih kegiatan penyusunan soal USBN oleh MGMP sebagai dasar pemilihan MGMP yang dijadikan sampel, karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan peran MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru dan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan MGMP. Responden kajian ini adalah ketua MGMP seluruh Mapel K-13 di SMP yaitu: (i) Bahasa Indonesia, (ii) Bahasa Inggris, (iii) Matematika, (iv) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (v) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (vi) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), (vii) Pendidikan Agama (PA), (viii) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), (ix) Seni Budaya dan Kesenian (SBK), dan (x) Prakarya.

Data yang dikumpulkan antara lain terkait profil MGMP, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, output yang dihasilkan, diseminasi hasil kegiatan termasuk transfer hasil kepada peserta didik, serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan praktik baik yang dapat dicontoh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan para ketua MGMP. Data yang terkumpul dianalisis

secara deskriptif dengan tahapan analisis sebagai berikut: (i) merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait dengan upaya optimalisasi peran MGMP, (ii) penyajian data tentang upaya-upaya tersebut beserta tingkat keberhasilannya dan penyebab ketidakberhasilannya dalam bentuk tabel, dan (iii) penarikan simpulan dan verifikasi terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan beserta tingkat keberhasilannya dan dari sini ditemukan upaya-upaya yang masih harus dilakukan. Berikut ini disampaikan prosedur analisis data sampai pada proses menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Pertanyaan diskusinya misalnya: Apakah MGMP menyusun perencanaan kegiatan? Jika menyusun perencanaan kegiatan, apakah bisa memberikan *foto copy* perencanaan yang telah dibuat tersebut? Dalam diskusi umumnya disampaikan bahwa MGMP menyusun perencanaan kegiatan, namun ketika diminta menunjukkan buktinya banyak yang tidak memberikannya, maka disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil MGMP yang menyusun rencana kegiatan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan umum penelitian adalah bahwa dinas pendidikan tidak menetapkan kriteria khusus dalam menunjuk MGMP untuk menyusun soal USBN. Dari 10 MGMP yang ditunjuk menyusun soal USBN, hanya 4 MGMP (40 persen) yang membuat perencanaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dari 4 MGMP yang merencanakan kegiatan penyusunan soal USBN, hanya 1 MGMP yang benar-benar merealisasikan perencanaannya, sehingga hanya 1 dari 10

MGMP (10 persen) yang merencanakan dan merealisasikan rencana kegiatan penyusunan soal USBN. Meskipun banyak MGMP yang tidak merencanakan dengan baik kegiatan penyusunan soal USBN namun kegiatan tersebut tetap menghasilkan dua paket soal untuk digunakan dalam pelaksanaan USBN. Perencanaan yang kurang matang tersebut menyebabkan tidak terjadwalnya diseminasi hasilnya kepada guru-guru, dan juga transfer hasil kepada siswa sehingga terkesan kegiatan penyusunan soal USBN cenderung untuk membuat pintar guru-guru yang mengikutinya dan bukan untuk memintarkan siswa. Ada praktik baik di Flores Timur yang dapat dicontoh untuk memberdayakan peran MGMP dalam meningkatkan kualitas guru. Ada MGMP berhasil meyakinkan kepala sekolah dan komite sekolah sehingga kepala sekolah dan komite sekolah melihat pentingnya peran MGMP dan bersedia mendukung kegiatan MGMP dengan menyisihkan dana BOS dan dana komite sekolah untuk keperluan pelaksanaan kegiatan MGMP. Jumlah MGMP di Kabupaten Flores Timur untuk setiap mata pelajaran umumnya lebih dari satu, manfaatnya untuk memudahkan anggota mengikuti kegiatan MGMP. Jika di setiap kabupaten hanya ada satu MGMP untuk setiap Mapel maka, anggota yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten akan kesulitan mengikuti kegiatan MGMP karena membutuhkan biaya yang besar baik biaya

transportasi maupun waktu untuk mencapai lokasi pertemuan.

Profil MGMP penyusun soal USBN

Untuk menyusun soal USBN, dinas pendidikan menunjuk MGMP tertentu untuk menyusunnya. Yang menjadi pertanyaan apakah digunakan persyaratan tertentu dalam memilih MGMP untuk menyusun soal USBN. Berikut dijelaskan beberapa komponen profil MGMP yang ditunjuk menyusun soal USBN, seperti umur atau lama MGMP berdiri, jumlah anggota MGMP, jumlah sekolah yang tergabung dalam MGMP dan sebagainya.

1. Lama MGMP berdiri

Berikut disajikan tabel umur MGMP penyusun soal USBN 2017. Terlihat dari tabel tersebut bahwa dinas pendidikan tidak menetapkan persyaratan terkait umur MGMP dalam menentukan MGMP penyusun USBN. Terdapat tiga MGMP yang memang sudah lebih dari lima tahun berdiri yaitu MGMP Mapel: PKn, IPS dan PA. Kemudian ada tiga MGMP yang baru empat tahun berdiri yaitu MGMP: Bahasa Inggris, IPA dan PJOK ketika ditugaskan untuk menyusun soal USBN. Selanjutnya MGMP Matematika baru berumur dua tahun ketika ditunjuk menyusun soal USBN, dua MGMP baru berumur satu tahun ketika ditunjuk menyusun soal USBN yaitu MGMP Bahasa Indonesia dan SBK, sedangkan MGMP Prakarya baru dibentuk dan langsung ditugaskan menyusun soal USBN.

Tabel 2. Umur MGMP penyusun soal USBN 2017

| Komponen profil | MGMP | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| | PKn | IPS | Bindo | Bing | Mat | IPA | PA | PJOK | SBK | Prak |
| Umur MGMP (tahun) | ≥ 5 | ≥ 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | ≥ 5 | 4 | 1 | 0 |

2. Jumlah sekolah yang terlibat dalam MGMP

Pada umumnya di setiap kabupaten/kota terdapat satu MGMP untuk masing-masing Mapel, dan semua sekolah termasuk madrasah dihimbau dan diajak oleh dinas pendidikan untuk melibatkan gurunya dalam kegiatan MGMP. Untuk kasus di Flotim karena terdiri atas pulau-pulau kecil maka hampir di setiap pulau dibentuk sub rayon MGMP, bahkan tidak menutup kemungkinan di suatu pulau bisa terdapat lebih dari satu sub rayon MGMP tergantung lokasi sekolah-sekolah di suatu wilayah tertentu yang memiliki kemudahan untuk berkumpul. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa MGMP yang ditunjuk dinas pendidikan menyusun soal USBN, jumlah sekolah yang terlibat di dalamnya, jumlahnya berbeda-beda antara satu MGMP dengan MGMP yang lainnya.

MGMP berkisar antara tiga hingga 20 sekolah. Semakin banyak sekolah yang terlibat menunjukkan semakin besarnya MGMP. Untuk kegiatan ini, semakin banyak sekolah yang terlibat semakin bagus, karena guru-guru yang terlibat penyusunan soal USBN akan mentransfer ilmunya kepada lebih banyak peserta didiknya sehingga semakin banyak peserta didik yang disiapkan untuk mengikuti USBN. Terkait jumlah sekolah dalam MGMP juga bukan menjadi persyaratan bagi Dinas dalam penetapan MGMP menyusun USBN.

3. Keaktifan anggota MGMP

Tabel berikut menyajikan jumlah anggota MGMP yang aktif dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdaftar. Terkait keaktifan anggota MGMP juga tidak dijadikan oleh dinas pendidikan sebagai

Tabel 3. Jumlah sekolah yang terlibat MGMP

| Jenis dan status sekolah | MGMP | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-------|------|-----|-----|----|------|-----|------|
| | PKn | IPS | Bindo | Bing | Mat | IPA | PA | PJOK | SBK | Prak |
| 1. SMP Negeri | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 2. SMP Swata | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | | 3 | |
| 3. MTs Negeri | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 4. MTs Swasta | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 2 |
| Jumlah sekolah | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 11 | 14 | 3 | 20 | 5 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah sekolah dan madrasah yang terlibat dalam

persyaratan dalam menetapkan MGMP penyusun soal USBN.

Tabel 4. Keaktifan anggota MGMP tahun 2018

| Jumlah anggota | MGMP | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|-------|------|-----|-----|----|------|-----|------|
| | PKn | IPS | Bindo | Bing | Mat | IPA | PA | PJOK | SBK | Prak |
| 1. Terdaftar | 15 | 15 | - | 11 | 25 | 19 | 20 | 3 | 50 | - |
| 2. Aktif | 15 | 15 | - | 7 | 25 | - | 20 | 3 | 36 | - |
| Rasio anggota aktif/terdaftar | 1 | 1 | - | 0,6 | 1 | - | 1 | 1 | 0,7 | - |

Dari tabel terlihat bahwa rasio anggota MGMP yang aktif dari anggota terdaftar cenderung satu meskipun ada yang kurang dari satu, namun oleh karena rasionya di atas separoh dan menuju ke satu maka informasi ini menunjukkan bahwa guru-guru cukup bersemangat di dalam melakukan kegiatan pengembangan diri melalui MGMP. Meskipun begitu terdapat tiga MGMP yang pelaksanaan kegiatannya kurang mendapat perhatian dari anggota MGMP yaitu MGMP Bahasa Indonesia, IPA dan Prakarya. Ketua MGMP IPA masih bisa mendata jumlah anggota dalam wadah/forumnya namun tidak bisa memberikan data yang akurat tentang jumlah anggotanya yang aktif. MGMP Bahasa Indonesia dan Prakarya sendiri belum mampu mendata jumlah anggotanya begitu pula jumlah anggotanya yang aktif. Informasi ini menunjukkan bahwa kegiatan kedua MGMP ini belum berjalan baik.

4. Sumber Pendanaan Kegiatan MGMP

Pada kenyataannya sumber pendanaan kegiatan MGMP berasal dari berbagai sumber antara lain dari *block grant* pemerintah Pusat melalui Ditjen GTK, dari kantor Kemenag kabupaten/kota, dari iuran sekolah, iuran komite dan iuran anggota sendiri. Namun demikian, tidak semua

MGMP berhasil menghimpun sumber dana tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Terkait sumber pendanaan juga tidak dijadikan sebagai kriteria oleh dinas pendidikan dalam penetapan MGMP penyusun soal USBN

Sejauh ini pelaksanaan kegiatan MGMP pada MGMP tertentu tidak berjalan lancar karena terkendala biaya. Terdapat tiga MGMP di Flotim yang kegiatannya tidak terlaksana dengan baik karena terkendala pendanaan yaitu MGMP Bahasa Indonesia, IPA dan Prakarya. Sungguh sangat disayangkan bahwa terdapat MGMP Mapel UN yang kegiatannya kurang dapat berjalan dengan baik karena terkendala biaya yaitu MGMP IPA dan Bahasa Indonesia. Padahal sementara ini, salah satu indikator mutu pendidikan adalah nilai UNBK, sehingga sangat disayangkan memang ada MGMP Mapel UN yang tidak dapat menjalankan kegiatannya karena terkendala biaya. Pemerintah khususnya pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada MGMP Mapel UN karena alasan yang dikemukakan di atas.

Berkaitan dengan permasalahan tidak terlaksanakannya kegiatan MGMP karena terkendala biaya, maka pemerintah Pusat menyediakan *block grant*. *Block Grant* dari Pusat merupakan sumber dana yang

Tabel 5. Sumber Pendanaan Kegiatan MGMP tahun 2017/2018

| Sumber dana tahun 2018 | MGMP | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|-------|------|-----|-----|----|------|-----|------|
| | PKn | IPS | Bindo | Bing | Mat | IPA | PA | PJOK | SBK | Prak |
| 1. <i>Block grant</i> Pusat | γ | γ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Pemerintah Daerah | - | - | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
| 3. Kantor Kemenag | - | - | - | - | - | - | γ | - | - | - |
| 4. Iuran anggota | - | - | - | - | γ | - | - | γ | γ | - |
| 5. Iuran sekolah/komite | - | - | - | γ | γ | - | - | γ | - | - |

tidak pasti didapat MGMP karena sangat tergantung kepada keuangan Pemerintah. Pada tahun ajaran 2017/2018 Pemerintah Pusat melalui Ditjen GTK memberikan *block grant* khususnya untuk MGMP Mapel IPS dan PKn. Tujuan utama pemberian *block grant* tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi guru terutama dalam penyusunan soal USBN (Surat Ditjen GTK Nomor 01554/B/GT/2017). Karena keterbatasan anggaran, maka Pusat hanya bisa memberikan *block grant* untuk MGMP Mapel PKn dan IPS saja, untuk Mapel lainnya Pemerintah Pusat menghimbau Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan. Namun demikian, himbauan itu tidak serta merta diikuti oleh Pemda, karena sangat tergantung kepada kondisi keuangan Pemda.

Perlu diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, pemerintah berusaha menyusun soal-soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang menuntut siswa berpikir aras tinggi dalam menjawabnya. Agar siswa dapat menjawab soal-soal aras tinggi tersebut maka pemerintah terus melatih guru-guru agar mampu menyusun soal aras tinggi, sebagaimana ditulis Idhom (2017) bahwa untuk mempermudah guru dalam menyusun soal aras tinggi untuk USBN maka pemerintah Pusat melatih sebanyak 6.000 guru dengan menganggarkan biaya pelatihan sebesar 320 miliar.

Block grant dari Pusat hanya diberikan kepada dua MGMP yaitu MGMP PKn dan IPS yang besarnya Rp 35.000.000,-/MGMP. Sumber dana dari Pemda diterima oleh semua MGMP yang tidak menerima *block grant* dari Pusat dan ditujukan untuk menyusun soal USBN. Besarnya bantuan dari Pusat diketahui jumlahnya namun besar bantuan

dari Pemda untuk penyusunan soal USBN tidak diketahui jumlahnya per MGMP karena bantuan tersebut tidak diserahkan langsung ke MGMP untuk dikelola sendiri oleh MGMP melainkan dikelola langsung oleh dinas pendidikan. Caranya dinas pendidikan mengundang guru anggota MGMP dan menugaskan mereka untuk menyusun soal USBN. Guru anggota MGMP ini dibayar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

MGMP tertentu di Kabupaten Flotim berusaha untuk menjalankan kegiatannya dengan mengadakan sumber dana sendiri. Pengalaman-pengalaman pendanaan berikut semoga dapat dicontoh oleh MGMP yang belum melaksanakan kegiatannya dengan baik, baik untuk MGMP di Flotim maupun MGMP di wilayah lain di Indonesia.

Sumber dana lainnya untuk pelaksanaan kegiatan MGMP di luar penyusunan soal USBN adalah dari iuran sekolah atau iuran komite sebagaimana yang terjadi pada MGMP Bahasa Inggris, Matematika dan PJOK. Besar iuran sekolah adalah sebesar Rp 500.000,-/tahun/sekolah. Dana tersebut berasal dari iuran komite. Hal ini tentunya sangat menarik karena dimana-mana digaungkan sekolah gratis bahkan sampai dengan pendidikan menengah, sehingga jika ada orangtua yang mau membayar iuran komite untuk keperluan peningkatan kualitas guru di MGMP, tentunya merupakan suatu keberhasilan manajemen sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat khususnya orangtua murid bahwa peningkatan kualitas guru merupakan suatu kebutuhan yang sangat *urgent* untuk dilakukan. Bahkan MGMP PJOK dan Bahasa Inggris menyampaikan bahwa pengurusnya berhasil me-*lobby* kepala

sekolahnya sehingga kepala sekolah mau menyisihkan dana BOS untuk pembiayaan peningkatan kualitas guru di MGMP yaitu sebesar Rp 5.000,-/siswa per tahun. Cara MGMP untuk mendapat sumber biaya seperti ini pantas untuk dicontoh.

Banyak guru juga merasa pengembangan diri guru itu sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga guru mau urunan untuk membantu pembiayaan kegiatan MGMP. MGMP di Flotim yang anggotanya membayar iuran untuk pembiayaan kegiatan MGMP adalah MGMP Matematika dengan besar urunannya Rp 5.000,-/anggota/pertemuan, MGMP PJOK dengan besar urunan Rp 10.000,-/anggota/bulan dan MGMP SBK dengan besar urunannya Rp 20.000,-/anggota per bulan. Dari uraian dalam dua paragraf terakhir ini terlihat bahwa MGMP di Flotim yang benar-benar aktif menjalankan kegiatannya dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah adalah MGMP Bahasa Inggris, Matematika, PJOK dan SBK.

Selain itu MGMP PA Katholik di Kabupaten Flotim sering mendapat dukungan dana dari kantor Kemenag. MGMP tersebut mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan. Dana yang biasanya diajukan per kegiatan/semester adalah sebesar 5 juta rupiah. Pengalaman mereka umumnya proposal pendanaan kegiatan mereka biasanya disetujui kantor Kemenag.

5. Pola pembiayaan kegiatan di MGMP

Dari 10 ketua MGMP yang diajak berdiskusi dan mengisi kuesioner ternyata umumnya tidak memiliki pola pembiayaan kegiatan yang jelas. Sebanyak dua dari 10 MGMP yang telah menyampaikan pola

pembiayaan kegiatan di MGMP mereka. Kedua MGMP tersebut adalah Matematika dan IPA. Jadi sisanya termasuk MGMP PKn dan IPS yang menerima bantuan dari Pusat tidak memiliki pola pendanaan kegiatan. Dari dua MGMP yang memiliki pola pendanaan yang jelas, ternyata sebagian besar dana digunakan untuk konsumsi. Pola pendanaan seperti ini sebaiknya diperbaiki karena seharusnya dana yang berhasil dihimpun lebih banyak digunakan untuk mendatangkan nara sumber atau instruktur atau fasilitator kegiatan. Jadi perlu ada pola pembiayaan yang lebih jelas yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam mendanai kegiatan MGMP. Dana yang berhasil dihimpun agar dapat dimanfaatkan untuk komponen biaya berikut (i) honor nara sumber eksternal, (ii) transport nara sumber eksternal, (iii) insentif fasilitator internal, (iv) pengadaan sarana/media, (v) perawatan sarana/media, (vi) foto copy bahan/pengadaan bahan pembelajaran, (vii) insentif pengurus MGMP, dan (viii) konsumsi pertemuan.

6. Susunan organisasi di MGMP

Mengenai susunan organisasi MGMP penyusun soal USBN ternyata semua MGMP yang ditugaskan untuk menyusun soal USBN memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk penerima bantuan *block grant* yaitu susunan organisasinya minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Bahkan ada 3 MGMP yaitu PKn, Bahasa Inggris dan SBK sudah memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap yaitu selain ketiga komponen kepengurusan tersebut masih ada 3 ketua bidang yaitu: (i) perencanaan dan pelaksanaan program, (ii) organisasi, administrasi, sarana prasarana, dan (iii) Humas dan kerja sama.

7. Kepemilikan rencana/program kegiatan

Sebagaimana diketahui suatu forum semacam MGMP haruslah memiliki rencana kegiatan yang menjadi panduan bagi MGMP dalam melaksanakan kegiatannya. Dari 10 MGMP sebanyak 80 persen yang memiliki dokumen rencana kegiatan tahunan. Jadi ada 2 MGMP atau 20 persen MGMP di Kabupaten Flotim yang tidak memiliki rencana kegiatan tahunan yaitu MGMP Bahasa Indonesia dan MGMP Prakarya. Kalau MGMP Prakarya masih belum memiliki rencana kegiatan sebenarnya cukup masuk akal karena Prakarya merupakan mata pelajaran baru dalam Kurikulum 2013, namun kalau MGMP Bahasa Indonesia tidak memiliki rencana kegiatan tahunan, ini merupakan suatu kemunduran karena Bahasa Indonesia merupakan Mapel UN yang menjadi salah satu penentu mutu pendidikan Indonesia, maka pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan permasalahan ini.

Di antara yang sudah memiliki rencana kegiatan tahunan, umumnya yang menyusun rencana kegiatan tahunan tersebut adalah pengurus MGMP. Bahkan sebagian besar juga melibatkan anggota dalam menyusun rencana kegiatan tahunan MGMP. MGMP Bahasa Inggris justru melibatkan kepala sekolah dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan tersebut, dan ini merupakan salah satu kelebihan, karena dengan melibatkan kepala sekolah, kepala sekolah selaku pengelola dana di sekolah mengetahui kegiatan MGMP dan akan mendukung kegiatan MGMP.

8. Kepemilikan instruktur internal MGMP serta cara pemilihannya

Instruktur internal sangat dibutuhkan

untuk pelaksanaan kegiatan MGMP. Instruktur internal merupakan fasilitator kegiatan MGMP ketika MGMP tidak memiliki anggaran untuk mengadakan instruktur eksternal atau nara sumber dari luar misalnya pengawas atau widiyaswara dan sebagainya. Dari 10 responden ketua MGMP baru separoh atau 50 persen yang pada kenyataannya memiliki instruktur internal. Terdapat beberapa cara pemilihan anggota menjadi instruktur internal antara lain: (i) dimulai dengan musyawarah antaranggota kemudian calon terpilih diusulkan untuk ditetapkan dinas pendidikan, (ii) ditunjuk oleh ketua dan ditetapkan dinas pendidikan, (iii) ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan, dan (iv) ditunjuk oleh forum kelompok kerja kepala sekolah. Tentunya cara pertama yang paling demokratis, yang perlu dicontoh. Namun demikian, sebaiknya setiap anggota diberi kesempatan untuk menjadi instruktur internal secara bergiliran karena cara ini dapat memaksa guru untuk belajar yaitu mempersiapkan diri untuk menjadi fasilitator kegiatan. Meskipun begitu cara penunjukan guru menjadi instruktur agar memenuhi kriteria tertentu berikut yaitu guru yang: (i) pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi instruktur, (ii) berprestasi, (iii) memiliki keterampilan sesuai bidangnya, dan (iv) paling rajin mengikuti kegiatan. Tentunya kriteria pertamalah yang paling diharapkan untuk diterapkan.

9. Kepemilikan sarana/prasarana pendukung kegiatan MGMP

Sarana/prasarana yang berhasil diidentifikasi diperlukan untuk mendukung kegiatan MGMP meliputi: (i) ruang pertemuan, (ii) papan tulis, (iii) *in-focus*, (iv)

printer, (v) *wi-fi*, dan (vi) laptop/komputer. Pada umumnya semua sarana/prasarana yang disebutkan ini bisa dipakai MGMP jika sekolah memilikinya. MGMP tinggal meminta izin kepada kepala sekolah untuk memanfaatkannya. Namun demikian ada beberapa sarana yang sebaiknya dimiliki sendiri seperti laptop dan printer agar memudahkan MGMP dalam melaksanakan kegiatannya serta membuat laporan kegiatan. Selain itu disampaikan pula bahwa banyak anggota sudah memiliki laptop atau komputer yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan MGMP. *Wi-fi* juga merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan, dan sebagian guru sudah memilikinya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan MGMP. Sarana-parasarana seperti ini sebaiknya memang dimiliki oleh seorang guru karena sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalismey. Di Flotim baru MGMP IPA yang memiliki *in-focus* dan printer serta laptop sendiri.

10. Jumlah pertemuan MGMP dalam setahun

Salah satu kriteria yang ditetapkan Pusat bagi dinas pendidikan dalam menunjuk MGMP memperoleh bantuan dana *block grant* dari Pusat adalah bahwa MGMP tersebut mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya sehingga dalam setahun ada 12 kali pertemuan. Ternyata MGMP PKn dan IPS di kabupaten Flotim tidak memenuhi persyaratan tersebut, namun karena Pusat sudah menetapkan memberikan bantuan per kabupaten satu MGMP PKn dan satu MGMP IPS, maka dinas pendidikan terpaksa menunjuk MGMP PKn dan IPS yang ada guna menerima bantuan tersebut meski tidak

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan ini ternyata juga tidak diterapkan dinas pendidikan dalam menetapkan MGMP Mapel K-13 lainnya untuk menyusun soal USBN.

Satu-satunya MGMP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan adalah MGMP IPA, yang ternyata melakukan pertemuan 23 kali dalam setahun. Sayangnya MGMP IPA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pusat karena Pusat menetapkan yang mendapat bantuan dana *block grant* pada tahun 2017 adalah MGMP PKn dan IPS. Tak satupun ketua MGMP yang mengetahui alasan di balik penetapan MGMP PKn dan IPS yang mendapat bantuan. Mereka hanya menduga bahwa selama ini sudah banyak bantuan diberikan kepada MGMP Mapel UN saja maka Pemerintah mungkin mau membantu juga Mapel non UN agar tidak merasa dianaktirikan. Namun demikian dugaan ini tidak sepenuhnya benar karena Mapel non UN bukan hanya PKn dan IPS saja tetapi masih ada yang lainnya yaitu PA, PJOK, SBK, dan Prakarya. Untuk itu supaya MGMP yang satu tidak iri dengan yang lain sebaiknya bantuan kepada MGMP agar diberikan secara merata, dan sebaiknya berdasarkan pengajuan proposal supaya semua MGMP mendapat kesempatan yang sama untuk menerima bantuan.

11. Pengawasan kegiatan di MGMP

Terhadap kegiatan MGMP sebaiknya ada pengawasan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Petugas yang dapat melakukan pengawasan adalah pengawas dari dinas Pendidikan maupun dari kantor Kemenag khususnya untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan

MGMP PA. Sementara ini di Flotim baru ada empat MGMP yang pelaksanaan kegiatannya mendapat pengawasan dari dinas pendidikan yaitu MGMP: PKn, IPA, PA, dan SBK. Ada dua MGMP yang pelaksanaan kegiatannya mendapat pengawasan dari kepala sekolah yaitu MGMP Bahasa Inggris dan PJOK. Ada empat MGMP yang pelaksanaan kegiatannya sama sekali tidak mendapat pengawasan yaitu MGMP: IPS, Bahasa Indonesia, Matematika dan Prakarya. Untuk itu maka dinas pendidikan supaya memberikan tugas kepada pengawas agar selain mengawasi sekolah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan MGMP. Apalagi MGMP IPS dan PKn yang mendapat bantuan dana *block grant* dari Pusat, seharusnya kegiatannya perlu mendapat pengawasan.

12. Pembuatan laporan keuangan dan transparansinya

Dana-dana bantuan yang berhasil dikumpulkan MGMP untuk melaksanakan kegiatannya sebaiknya dilaporkan pemanfaatannya untuk keperluan apa saja secara jelas dengan bukti-buktinya sebagai bentuk pertanggungjawaban MGMP kepada pemberi bantuan. Untuk itu maka MGMP perlu membuat laporan keuangannya pada setiap akhir tahun. Apalagi kalau MGMP tersebut mendapat bantuan dana dari Pusat, maka pemanfaatan dana tersebut harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian uang rakyat. Di Kabupaten Flotim ternyata belum semua MGMP membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Tercatat lima dari 10 MGMP sampel atau sebanyak 50 persen tidak membuat laporan keuangan, termasuk MGMP PKn dan IPS yang mendapat bantuan dana dari Pusat.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena seharusnya MGMP tersebut membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterimanya. Jadi, Pusat yang memberikan bantuan kepada MGMP, agar mempersiapkan format-format pembuatan laporan sehingga memudahkan MGMP dalam membuat laporan keuangan. Selain itu pemberi bantuan harus dapat memperoleh keyakinan bahwa dana yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai disalahgunakan.

Selanjutnya mengenai transparansi laporan keuangan, belum semua MGMP yang membuat laporan keuangan menyampaikan bahwa laporan keuangan yang dibuatnya dapat diakses oleh siapapun. Dari lima MGMP yang membuat laporan keuangan, baru 80 persen yang menyampaikan bahwa laporan keuangannya dapat diakses oleh siapapun. Seharusnya memang laporan keuangan MGMP terbuka bagi setiap orang khususnya anggota MGMP agar mereka turut mengawasi pemanfaatan keuangan untuk pendanaan kegiatan MGMP.

Perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN di MGMP

MGMP mempunyai banyak kegiatan dan salah satu yang paling pokok atau utama adalah bertemu dan belajar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru ketika melakukan pembelajaran. Tentunya akan sangat baik apabila MGMP membuat perencanaan kegiatannya pada setiap awal tahun ajaran yang dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan. Sayangnya MGMP umumnya belum membuat perencanaan dengan baik. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelaksanaan

penyusunan soal USBN. Penyusunan soal USBN menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting bagi guru karena guru mendapat ilmu untuk menyusun soal USBN dimana ilmu tersebut dapat ditransfer kepada siswa khususnya yang akan menghadapi USBN. Dengan demikian siswa akan lebih siap dalam menghadapi USBN sehingga dapat memperoleh nilai yang lebih baik untuk kepentingan menjaga mutu lulusan.

Namun karena berbagai kendala seperti keterbatasan waktu dan kendala anggaran, maka penyusunan soal USBN yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota MGMP, khususnya yang mengajar kelas ujian akhir yaitu kelas IX SMP, pada kenyataan tidak dapat melibatkan semua anggota tersebut. Di Flotim penyusunan soal USBN dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh dinas pendidikan. Tim penyusun soal USBN terdiri dari beberapa orang guru anggota MGMP. Alasan kebijakan ini diambil antara lain karena anggaran Daerah yang terbatas, sehingga tidak bisa melibatkan seluruh anggota MGMP. Dengan demikian, MGMP tidak dapat membuat perencanaan tentang penyusunan soal USBN, karena kegiatan ini dikoordinir dan dikelola langsung oleh dinas pendidikan.

1. Kepemilikan dokumen perencanaan kegiatan Penyusunan soal USBN

Meskipun sebagian MGMP tidak dilibatkan dalam penyusunan soal USBN, namun demikian, ketua MGMP seharusnya sigap dan menyikapi kegiatan penyusunan soal USBN tersebut serta menyadari betapa pentingnya mengambil manfaat dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan mutu lulusan. Ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Ketua atau pengurus MGMP seharusnya meminta guru-guru yang ditugaskan dinas pendidikan dalam kegiatan penyusunan soal tersebut agar bersedia menularkan ilmunya kepada rekan gurunya di MGMP sehingga rekannya yang tidak terlibat penyusunan soal USBN mendapat ilmu tentang penyusunan soal USBN dan siap mentransfernya atau mengajarkannya kepada siswanya. Rupanya kegiatan peningkatan mutu lulusan ini kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh MGMP, terlihat dari tidak adanya penyusunan rencana yang matang tentang penyusunan soal USBN ini. Dari 10 MGMP sampel hanya 4 MGMP atau hanya 40 persen MGMP yang membuat rencana penyusunan soal USBN, yaitu MGMP PKn, Bahasa Inggris, PA Katholik, dan PJOK. MGMP yang tidak menyusun perencanaan kegiatannya adalah MGMP: IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, SBK dan Prakarya.

2. Unsur yang ditugaskan menyusun Perencanaan Kegiatan Penyusunan Soal USBN

Di antara keempat MGMP yang membuat perencanaan kegiatan, yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan kegiatan adalah sebagai berikut. MGMP PKn menugaskan ketua MGMP dengan dibantu instruktur eksternal, MGMP Bahasa Inggris merencanakan menugaskan ketua MGMP, MGMP PA Katholik merencanakan menugaskan ketua MGMP dengan dibantu anggota, instruktur internal dan pengawas, sedangkan MGMP PJOK merencanakan menugaskan anggota MGMP. Meskipun yang ditugaskan menyusun perencanaan adalah anggota MGMP, namun sebaiknya ketua MGMP tetap terlibat menjadi

penanggung jawab kegiatan penyusunan rencana kegiatan.

3. Perencanaan Waktu Penyusunan Perencanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan suatu kegiatan perlu direncanakan pemanfaatan waktunya seefisien mungkin agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal. USBN umumnya dilaksanakan di pertengahan semester kedua, dengan demikian maka perencanaan yang ideal harus sudah dibuat pada awal semester pertama. Kalau perencanaan dibuat di awal semester kedua tentunya sudah terlambat karena tinggal beberapa saat lagi akan dilaksanakan USBN, sehingga hasil yang dicapai pasti kurang maksimal. Di antara empat MGMP yang merencanakan penyusunan soal USBN, terdapat dua dari empat MGMP yaitu PKn dan Bahasa Inggris yang mulai merencanakan kegiatan di awal tahun ajaran baru yaitu sekitar bulan Juli hingga Agustus, namun dua MGMP lainnya yaitu PA dan PJOK baru merencanakan kegiatannya di awal semester kedua. Untuk dua MGMP pertama tentunya perencanaannya pasti lebih matang karena sudah direncanakan di awal semester pertama, sedangkan untuk MGMP yang baru membuat perencanaan di awal semester kedua tentunya perencanaannya kurang matang karena tidak lama kemudian soal USBN yang disusun sudah akan digunakan untuk pelaksanaan USBN, sehingga anggota MGMP yang ikut kegiatan tidak memiliki waktu memadai untuk mendiseminasikan hasilnya kepada rekannya yang mengajar Mapel yang sama. Untuk guru saja tidak memadai waktunya, tentunya untuk siswa pasti sama sekali sudah tidak sempat.

4. Perencanaan isi kegiatan Penyusunan soal USBN

Tentang isi perencanaannya, hanya ada dua MGMP yang merencanakan dengan lebih lengkap isi perencanaannya meliputi jumlah anggota MGMP yang akan dilibatkan, jumlah instruktur internal dan eksternal yang akan dilibatkan dan perencanaan lama waktu pelaksanaan kegiatan atau jadwal kegiatannya. Dari sini terlihat bahwa perencanaan penyusunan soal USBN sesungguhnya tidak direncanakan dengan matang, karena hanya dua dari 10 MGMP atau hanya 20 persen MGMP yang melakukan perencanaan penyusunan kegiatan MGMP dengan matang yaitu MGMP PKn dan MGMP PA Katholik. MGMP PJOK juga terlihat kurang serius merencanakan isi kegiatannya karena hanya menyajikan rencana lama pelaksanaan kegiatan saja tanpa ada perencanaan tentang jumlah anggota MGMP yang akan dilibatkan dan juga jumlah instruktur yang akan dilibatkan baik internal maupun eksternal.

5. Penyiap Bahan atau Materi Pelatihan Penyusunan Soal USBN

Khusus untuk materi pelatihan penyusunan soal USBN, di antara empat MGMP yang membuat perencanaan kegiatan, unsur yang direncanakan untuk ditugaskan khusus menyiapkan materi pelatihan penyusunan soal USBN adalah sebagai berikut. MGMP PKn merencanakan menugaskan instruktur eksternal, MGMP Bahasa Inggris merencanakan menugaskan ketua MGMP dibantu anggota, MGMP PA Katholik merencanakan menugaskan ketua MGMP dengan dibantu oleh anggota dan instruktur internal, dan juga melibatkan pihak luar MGMP yaitu instruktur eksternal,

serta pengawas; sedangkan MGMP PJOK merencanakan menugaskan anggota MGMP menyusun materi pelatihan penyusunan soal.

6. Perencanaan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan soal USBN

Mengenai perencanaan lokasi kegiatan khususnya penyusunan soal USBN, tiga dari empat MGMP yang membuat perencanaan kegiatan merencanakan akan melaksanakan kegiatannya di sekolah saja yaitu MGMP: PKn, PA Katholik dan PJOK. Sedangkan MGMP Bahasa Inggris merencanakan akan melakukan kegiatan penyusunan soal USBN di kantor atau gedung pemerintah. Bagaimanapun menurut penulis perencanaan tempat kegiatan memang lebih baik di sekolah saja, karena akan mendapat banyak kemudahan misalnya bisa menggunakan media pembelajaran seperti *in-focus* milik sekolah dan fasilitas atau sarana lainnya. Di kantor pemerintah juga boleh-boleh saja hanya saja ada potensi menimbulkan masalah misalnya terbatasnya jam buka kantor dan sebagainya.

7. Perencanaan metode pelatihan penyusunan soal USBN

Mengenai metode pelatihan penyusunan soal USBN, di antara empat MGMP yang membuat rencana penyusunan soal USBN, MGMP PKn dan Bahasa Inggris merencanakan menerapkan metode kerja kelompok, MGMP PA Katholik merencanakan menerapkan metode kerja kelompok namun juga dikombinasi dengan diskusi, kerja individu dan juga penjelasan atau ceramah, sedangkan MGMP PJOK merencanakan menerapkan metode diskusi. Tentunya metode yang

direncanakan oleh MGMP PJOK yang paling lengkap, dan seharusnya memang begitu jadi tidak monoton dengan salah satu metode saja.

Realisasi Perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN

Dalam paragraf lalu dibahas mengenai perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN, pada bagian ini dibahas bagaimana realisasi perencanaan kegiatan tersebut.

1. Realisasi penyusunan rencana kegiatan

Di antara empat MGMP yang membuat perencanaan kegiatan, ternyata hanya tiga MGMP yang merealisasikan perencanaannya yaitu MGMP: PKn, PA Katholik dan PJOK. Dari sini terlihat bahwa MGMP Bahasa Inggris meskipun membuat perencanaan namun kurang serius dalam merealisasikannya. Di antara tiga MGMP yang merealisasikan perencanaannya, dua MGMP yaitu PKn dan PJOK konsisten dalam realisasinya yaitu unsur yang ditugaskan pada kenyataannya juga yang menyusun dokumen rencana kegiatan. MGMP PKn merencanakan menugaskan Ketua MGMP dengan dibantu instruktur eksternal, namun pada kenyataan yang menyusunnnya adalah hanya ketua MGMP, dan ini dianggap konsisten karena ketua MGMP yang memang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana kegiatan. MGMP PJOK juga cukup konsisten karena dalam dokumen perencanaan menugaskan anggota MGMP menyusun perencanaan kegiatan dan pada kenyataannya memang demikian. Yang kurang konsisten adalah MGMP PA Katholik, dalam dokumen perencanaan menugaskan ketua MGMP dengan dibantu anggota, instruktur internal dan pengawas namun

faktanya yang telah menyusun dokumen rencana kegiatannya adalah pengawas. Dari sini juga terlihat kekurangseriusan ketua MGMP PA Katholik ini dalam merealisasikan perencanaannya, karena ternyata pihak luar MGMP yaitu pengawas yang telah menyusun rencana kegiatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak internal MGMP. Dengan demikian maka sesungguhnya hanya satu dari 10 (10 persen) MGMP sampel yang terlihat serius menyusun rencana kegiatannya dan merealisasikannya yaitu MGMP PKn.

2. Realisasi perencanaan isi kegiatan

Pada kenyataannya memang hanya MGMP PKn yang merealisasikan perencanaan kegiatannya. Jadi MGMP PKn boleh dikatakan merupakan satu-satunya MGMP yang paling mantap dalam membuat perencanaan kegiatannya dan merealisasikannya. MGMP PKn terlihat cukup konsisten dalam merealisasikan isi rencana kegiatannya. Jumlah anggota yang dilibatkan, lama waktu pelaksanaan kegiatan dan instruktur eksternal yang dilibatkan sesuai dengan rencana.

3. Realisasi penyiapan materi USBN

Terlihat ada tiga MGMP yang cukup serius membuat perencanaan kegiatan tentang siapa yang akan ditugaskan menyusun materi pelatihan penyusunan soal USBN yaitu MGMP: PKn, PA Katholik dan PJOK. MGMP PKn merencanakan meminta/menugaskan instruktur eksternal yang akan menyiapkan bahan/materi pelatihan penyusunan soal USBN. Demikian pula MGMP PJOK yang merencanakan menugaskan anggota MGMP menyusun materi pelatihan penyusunan soal USBN dan pada faktanya memang demikian

adanya; sedangkan MGMP PA Katholik yang tadinya menugaskan ketua MGMP menyiapkan materi pelatihan penyusunan soal USBN dengan dibantu oleh anggota dan instruktur internal serta instruktur eksternal dan pengawas, pada kenyataannya yang menyusunnya adalah anggota MGMP. Sebenarnya tidak konsisten namun karena yang menyusun adalah anggota yang awalnya juga ditugaskan maka dapat dikatakan cukup konsisten juga. Idealnya yang harus menyusun materi pelatihan penyusunan soal USBN memang instruktur eksternal namun tentunya tidak masalah siapa yang menyusun materi, yang terpenting adalah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan MGMP misalnya anggota yang sudah mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN.

4. Realisasi lokasi pelaksanaan kegiatan

Tentang realisasi lokasi kegiatan, dari tiga MGMP yaitu MGMP PKn, PA Katholik dan PJOK, yang merencanakan lokasi pelaksanaan pelatihan di sekolah pada kenyataannya memang terealisasi sesuai perencanaan yaitu dilaksanakan di sekolah.

5. Realisasi metode pelaksanaan kegiatan

Tentang realisasi metode pelatihan yang direncanakan untuk diterapkan dalam pelatihan maka ketiga MGMP yaitu MGMP: PKn, PA Katholik dan PJOK cukup konsisten dalam realisasinya. MGMP PKn merencanakan menerapkan metode kerja kelompok dan kenyataannya memang demikian, MGMP PJOK merencanakan menerapkan metode diskusi pada kenyataannya juga memang demikian, MGMP PA Katholik juga sama merencanakan akan menerapkan berbagai metode yaitu diskusi, kerja kelompok, kerja

individu dan penjelasan/ceramah dan pada kenyataan memang demikian juga. Tentunya metode yang diterapkan idealnya harus lebih dari satu biar tidak monoton dan tidak membosankan.

6. Kesesuaian kompetensi instruktur eksternal

Mengenai kompetensi instruktur eksternal yang membantu pembimbingan penyusunan soal USBN, ketiga MGMP yang membuat perencanaan kegiatan berpendapat bahwa kompetensi yang dimiliki instruktur eksternal sesuai dengan harapan.

7. Kendala dalam pembuatan rencana kegiatan Penyusunan soal MGMP

Tidak banyak MGMP yang mengungkapkan kendala yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan penyusunan soal USBN. Hanya ada satu MGMP yang menyampaikan menemukan kendala dalam perencanaan penyusunan soal USBN yaitu banyak sekolah mengirimkan anggota MGMP penyusun soal USBN yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan soal USBN yang disusun artinya banyak guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu disebutkan pula bahwa MGMP mengalami kesulitan pembiayaan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dari 10 MGMP sampel yaitu kesepuluh MGMP Mapel K-13 di SMP, hanya ada empat atau 40 persen MGMP yaitu: PKn, Bahasa Inggris, PA Katholik dan PJOK yang membuat perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN. Dari empat MGMP tersebut hanya tiga (75 persen) MGMP yang cukup serius dalam membuat perencanaan kegiatan dan

merealisasikan perencanaan kegiatannya. Kemudian dari tiga MGMP tersebut hanya satu (33,3 persen) MGMP yang paling mantap dan paling matang dalam membuat perencanaan kegiatan dan merealisasikannya yaitu MGMP PKn.

Untuk MGMP lainnya mereka tidak membuat perencanaan kegiatan karena penyusunan soal USBN ditangani langsung oleh dinas pendidikan. Beberapa guru anggota MGMP ditugaskan oleh dinas pendidikan untuk menyusun soal USBN. Sebenarnya sama saja dengan MGMP yang menyusun perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN, mereka juga ditugaskan oleh dinas pendidikan, hanya saja MGMP menyempatkan untuk menyusun rencana kegiatannya biar lebih terarah.

Kabupaten Flotim terdiri dari beberapa pulau kecil memiliki beberapa sub rayon MGMP untuk setiap Mapel K-13. Hal ini karena beberapa sekolah yang letaknya berdekatan dan memiliki kemudahan akses untuk berkumpul dan belajar bersama, sekolahnya bersepakat untuk membentuk sebuah sub rayon MGMP; ini merupakan suatu praktik baik MGMP. Dengan demikian terdapat banyak sub rayon MGMP untuk setiap Mapel K-13. Karena alasan ini, maka dinas pendidikan tidak dapat melibatkan semua sub rayon MGMP untuk menyusun soal USBN. Dinas pendidikan mengambil kebijakan menunjuk dan menetapkan beberapa guru untuk menyusun soal USBN.

Secara umum penyusunan soal USBN berjalan sesuai perencanaan. MGMP yang menyempatkan menyusun perencanaan kegiatan menyusun soal USBN sesuai perencanaan yang telah dibuatnya, sedangkan MGMP yang tidak sempat

menyusun perencanaan kegiatan anggotanya yang ditunjuk dinas langsung bergerak dan berkumpul sesuai undangan dinas pendidikan menyusun soal USBN. Kendala yang umumnya dihadapi guru penyusun soal USBN adalah keterbatasan waktu. Karena terbatasnya waktu ini, tim penyusun soal USBN terpaksa memanfaatkan waktu luangnya di hari libur. Terkadang tugas harus dibawa pulang sebagai pekerjaan rumah. Apalagi di sela-sela menyusun soal USBN mereka masih harus mengajar sehingga mereka benar-benar merasakan kekurangan waktu.

Kemudian adanya tuntutan sejumlah soal yang dibuat harus berbasis *High Order Thinking skills* (HOTS), membuat banyak guru yang mengalami kesulitan karena belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan soal berbasis HOTS tersebut. Mereka memang pernah mengikuti pelatihan K-13 yang mana ada materinya menyusun soal HOTS namun menurut mereka pelatihan itu tidak cukup memberi ilmu yang memadai untuk dapat menyusun soal HOTS. Untuk itu guru-guru berharap agar mereka diberikan pelatihan untuk membuat soal HOTS. Harapan mereka minimal dari setiap rayon MGMP ada satu guru yang diundang untuk mengikuti pelatihan soal HOTS dan guru tersebut dapat dijadikan sebagai instruktur atau pembimbing pembuatan soal HOTS di setiap rayon MGMP.

Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN

Pelaksanaan kegiatan penyusunan soal USBN menghasilkan output berupa soal USBN. Soal-soal yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perakitan

soal oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan menggabungkan soal yang diterima dari MGMP dengan soal *anchor* yang diterima dari Pusat. Soal USBN dirakit menjadi dua jenis/paket soal yaitu yang satu digunakan untuk USBN yang pelaksanaannya sesuai jadwal, dan yang lainnya untuk USBN susulan.

Guru-guru sendiri mempertanyakan apakah soal yang disusunnya masuk kategori HOTS atau tidak karena tidak ada yang melakukan validasi dan verifikasi terhadap soal-soal yang telah dibuat tersebut. Untuk itu maka perlu ada tim ahli atau *expert* yang melakukan evaluasi atau penilaian terhadap soal-soal yang telah dibuat oleh guru tersebut.

Diseminasi hasil penyusunan soal USBN

Kegiatan penyusunan soal USBN yang berbasis HOTS memberikan informasi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan jumlah dan mutu lulusan. Untuk itu guru yang ditugaskan untuk menyusun soal USBN seharusnya diwajibkan untuk mendiseminasikan hasil pelatihan yang diperolehnya dengan rekan gurunya baik di internal sekolahnya maupun dengan rekan sejawatnya di forum MGMP. Langkah kegiatan ini sangat penting karena banyak sekolah yang gurunya tidak ikut menyusun soal USBN. Guru-guru tersebut perlu juga mengetahui contoh-contoh soal HOTS agar dapat diajarkan kepada siswanya agar siswanya lebih siap dalam menghadapi USBN maupun UNBK yang sebagian soalnya adalah soal aras tinggi yaitu yang membutuhkan daya nalar tinggi untuk menyelesaikannya. Untuk itu perlu penyusunan jadwal diseminasi hasil pelatihan yang wajib dilaksanakan oleh peserta

kegiatan. Faktanya memang ternyata tidak ada jadwal untuk diseminasi hasil kegiatan. Sangat disayangkan memang kalau tidak ada diseminasi, padahal pemerintah sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kegiatan penyusunan soal USBN.

Pembelajaran/transfer hasil kegiatan kepada peserta didik

Hasil kegiatan penyusunan soal seharusnya ditransfer atau diajarkan kepada siswa agar siswa menjadi lebih siap menghadapi USBN dan UNBK. Namun demikian, banyak responden mengeluhkan bahwa waktu untuk transfer hasil kegiatan kurang memadai. Selanjutnya untuk kegiatan transfer hasil ini harus dirancang jadwal pelaksanaannya agar dapat diperoleh gambaran yang utuh bahwa kegiatan yang diadakan memberikan dampak kepada siswa. Faktanya memang tidak ada jadwal untuk langkah transfer hasil kepada siswa, sehingga terkesan kegiatan yang diadakan sepertinya hanya untuk meningkatkan kompetensi guru saja bukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu lulusan.

Praktik baik penyelenggaraan MGMP di Kabupaten Flotim

1. Selama ini pelaksanaan kegiatan di banyak MGMP tidak berjalan lancar karena terkendala pendanaannya. Jalan keluar yang dilakukan sub rayon MGMP Matematika berikut ini dapat dicontoh MGMP lainnya. Ketua MGMP berhasil meyakinkan kepala sekolah tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan di MGMP. Kepala sekolah kemudian memutuskan mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 5.000,- per siswa per tahun untuk mendanai kegiatan di MGMP. Hal serupa juga dilakukan oleh MGMP

PJOK, namun MGMP PJOK lebih hebat lagi. Sama seperti MGMP Matematika, ketua MGMP PJOK berhasil meyakinkan kepala sekolah tentang pentingnya kegiatan MGMP, maka kepala sekolah mau mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 5.000,- per siswa per tahun untuk pelaksanaan kegiatan MGMP. Selain itu ketua MGMP juga berhasil meyakinkan komite sekolah tentang pentingnya kegiatan MGMP lalu komite sekolah siap membantu biaya pelaksanaan kegiatan di MGMP sebesar Rp 500.000,- per tahun. Selain itu anggota MGMP PJOK juga merasa pentingnya pengembangan diri guru, dan mereka pun bersedia membayar iuran sebesar Rp 10.000,-/anggota/bulan untuk keperluan pendanaan kegiatan MGMP.

2. Selama ini umumnya dipahami bersama bahwa MGMP untuk setiap Mapel cukup satu saja di setiap kabupaten/kota, namun demikian di Kabupaten Flotim terdapat lebih dari satu MGMP untuk setiap Mapel. Ini karena faktor geografis kabupaten tersebut yang terdiri atas beberapa pulau. Jika dipaksakan hanya memiliki satu MGMP, maka pelaksanaan kegiatannya akan sangat terhambat, karena anggota membutuhkan biaya transportasi yang besar, kemudian si anggota MGMP juga harus melakukan perjalanan menyeberang laut yang berpotensi membahayakan nyawa, dan tentunya juga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan perjalanan. Jadi sekelompok sekolah yang memiliki kemudahan akses yang sama untuk berkumpul membentuk sebuah MGMP. Dengan demikian ada lebih dari satu MGMP untuk Mapel yang sama. Sebagai

contoh di Pulau Adonara yang terdiri atas delapan kecamatan, terdapat lebih dari satu MGMP Matematika dan juga lebih dari satu MGMP Mapel lainnya; guru-guru yang menjadi anggota MGMP berasal dari sekolah-sekolah yang terletak di 2 atau 3 atau 4 kecamatan yang berdekatan.

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

Simpulan

Mengenai profil MGMP: terkait susunan organisasi MGMP, umumnya MGMP penyusun soal USBN memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan *block grant* karena semua MGMP memiliki susunan organisasi sesuai ketentuan yaitu minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Persyaratan lain yang ditetapkan untuk menetapkan MGMP penyusun soal USBN adalah MGMP yang melaksanakan 12 kali pertemuan dalam setahun. Ternyata sebagian besar MGMP penyusun soal USBN tidak memenuhi persyaratan tersebut, termasuk kedua MGMP yang menerima bantuan *block grant* dari Pusat. Untuk aspek profil lainnya memang tidak ada ketentuan khusus, namun ada beberapa aspek yang perlu untuk ditetapkan menjadi persyaratan pemilihan MGMP penyusun soal USBN. Contoh dari segi lama berdiri, maka tidak semua MGMP yang menyusun soal USBN sudah lebih dari satu tahun berdiri, terdapat sejumlah kecil MGMP yang baru berdiri ketika ditunjuk dinas pendidikan menyusun soal USBN. Dari aspek keaktifan anggota MGMP, ada sejumlah kecil MGMP yang keaktifan anggotanya tidak lebih besar dari 70 persen. Jadi kriteria yang dapat digunakan dalam menunjuk MGMP menjadi penyusun

soal USBN: memiliki struktur organisasi sesuai panduan, rutin melaksanakan kegiatan satu bulan satu kali, lama keberadaan MGMP misalnya sudah berdiri minimal 3 tahun, persentase keaktifan anggota di atas misalnya 90 persen.

Mengenai perencanaan kegiatan MGMP, sebagian besar MGMP tidak membuat perencanaan kegiatan MGMP khususnya terkait penyusunan soal USBN. Hanya sebagian kecil (40 persen) MGMP yang membuat perencanaan kegiatan penyusunan soal USBN. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena setiap kegiatan tanpa rencana yang matang hasilnya pasti kurang baik.

Karena kurang matangnya perencanaan tersebut maka di antara empat MGMP yang membuat perencanaan kegiatan, ternyata hanya tiga MGMP yang merealisasikan perencanaannya. Selanjutnya di antara tiga MGMP yang merealisasikan perencanaannya, hanya dua MGMP konsisten dalam merealisasikan perencanaannya. Jadi dari total 10 MGMP sampel hanya sebagian kecil (20 persen) yang melakukan perencanaan kegiatan dan merealisasikan perencanaannya yaitu menyusun soal USBN sesuai rencana yang telah dibuat.

Meskipun perencanaannya kurang matang namun setiap MGMP yang ditugaskan menyusun soal USBN tetap dapat menghasilkan dua jenis paket soal yang digunakan untuk melaksanakan USBN. Hanya saja guru-guru mempertanyakan apakah soal-soal yang disusunnya tersebut benar-benar merupakan soal-soal aras tinggi karena tidak ada langkah validasi dan verifikasi soal oleh tim ahli yang memahami tentang jenis soal aras tinggi. Untuk itu perlu ada tim yang dapat melakukan penilaian apakah soal yang dibuat

adalah benar soal aras tinggi.

Akibat lain dari kurang matangnya perencanaan penyusunan soal USBN adalah tidak adanya kegiatan tindak lanjut dari penyusunan soal USBN seperti diseminasi hasil kegiatan kepada guru yang tidak mendapat kesempatan menyusun soal USBN. Oleh karena tidak ada diseminasi hasil maka berdampak juga pada siswa. Ilmu yang diperoleh tidak sempat lagi dapat diajarkan/ditransfer kepada siswa, sehingga kegiatan penyusunan soal USBN terkesan lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru penyusunnya dan belum untuk meningkatkan jumlah dan mutu lulusan.

Sebagian MGMP di Flotim cukup kreatif dalam hal menghimpun dana untuk mendanai kegiatan MGMP. Pengurus MGMP berhasil meyakini kepala sekolah dan komite sekolah tentang pentingnya peran MGMP sehingga kepala sekolah dan juga komite sekolah, bersedia menyisihkan sebagian dananya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MGMP. Yang menarik adalah komite sekolah yang mau menarik iuran dari orang tua murid untuk mendanai kegiatan MGMP, padahal saat ini dimana-mana didengungkan pendidikan gratis. Selain itu di kabupaten yang luas secara geografis, apalagi yang terdiri atas beberapa pulau kecil seperti Flores Timur, keberadaan MGMP tidak harus satu MGMP per kabupaten tetapi boleh lebih dari 1 MGMP per kabupaten per Mapel untuk menekan biaya transportasi dan penghematan waktu. Caranya yaitu beberapa sekolah yang berada di suatu wilayah tertentu yang memiliki kemudahan transportasi untuk berkumpul membentuk satu sub rayon MGMP. Jadi di Kabupaten Flotim untuk setiap Mapel terdapat lebih dari satu MGMP.

Tentunya kajian ini mempunyai banyak keterbatasan karena hanya merupakan studi kasus, kemudian fokusnya pun hanya pada MGMP SMP. Dengan demikian hasil kajian ini tidak dapat mencerminkan MGMP yang sesungguhnya, karena di SMA dan SMK juga ada MGMP, kemudian di SD selain ada MGMP juga ada kelompok kerja guru kelas yang dikenal dengan Kelompok Kerja Guru (KKG). Agar didapat gambaran yang lebih komprehensif tentang keberadaan forum MGMP dan KKG ini agar dapat dibuat kebijakan untuk peningkatan peran KKG/MGMP, maka perlu terlebih dahulu diadakan kajian yang lebih komprehensif mencakup MGMP di SMA/SMK dan KKG di SD.

Opsi Kebijakan

1. Penunjukkan suatu forum untuk ditugaskan melaksanakan suatu program pemerintah sebaiknya benar-benar mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam kasus penyusunan soal USBN ternyata sebagian besar MGMP tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan khususnya MGMP yang setahun sebelumnya melaksanakan kegiatan MGMP sebanyak 12 kali pertemuan. Selanjutnya persyaratannya pun perlu ditambah misalnya keaktifan anggota minimal 90 persen, karena jika ada banyak anggota yang tidak aktif maka program kurang mengenai sasaran. Jika di suatu kabupaten tidak ada MGMP yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pelaksana program maka sebaiknya tidak dipaksakan dengan menugaskan beberapa guru untuk melakukan penyusunan soal USBN, karena lebih baik menggunakan soal

- USBN dari kabupaten lain di provinsi yang sama, karena dengan cara ini dapat memotivasi MGMP di kabupaten tersebut untuk menata dan memacu dirinya agar memenuhi persyaratan agar mendapat kesempatan untuk menyusun soal USBN pada tahun berikutnya.
2. MGMP yang telah ditunjuk untuk menyusun soal USBN sebaiknya merencanakan kegiatan dengan baik karena banyak MGMP ternyata tidak membuat rencana kegiatan. Ini karena keberhasilan program sangat tergantung pada perencanaan awal. Perencanaan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan, jadi sebaiknya perencanaan yang telah dibuat harus dapat diikuti atau direalisasikan
 3. Kegiatan MGMP yang hanya melibatkan sebagian kecil guru sebaiknya ditindaklanjuti dengan diseminasi kepada rekan sejawat baik di tingkat MGMP ataupun di tingkat sekolah dan perlu ditransfer atau dilakukan pembelajaran kepada siswa karena bagaimanapun tujuan akhir dari kegiatan penyusunan soal USBN adalah meningkatkan jumlah dan mutu lulusan, untuk itu dalam perencanaannya perlu dimunculkan jadwal diseminasi dan transfer hasil kepada siswa
 4. Selama ini banyak MGMP yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena kesulitan pendanaan. Praktik baik di Flotim dapat dicontoh di wilayah lain. Dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan MGMP perlu melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah sehingga mereka melihat pentingnya pelaksanaan kegiatan MGMP dan mau membantu pendanaannya misalnya dengan menyisihkan sebagian dana BOS atau bahkan iuran komite untuk mendukung kegiatan MGMP.
 5. Pembentukan MGMP tidak harus hanya satu untuk satu mata pelajaran per kabupaten. Di Flotim MGMP Mapel yang sama bisa ada lebih dari satu. Ini karena faktor geografis yang terdiri atas beberapa pulau. Bahkan di setiap pulau masih bisa terdapat lebih dari satu MGMP untuk Mapel tertentu sesuai dengan kemudahan akses untuk bertemu dari beberapa sekolah yang ada di suatu wilayah.

PUSTAKA ACUAN

- A'ing, A. 2015. Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Samarinda, Volume 3, No. 4, 545-559
- Awaliyah, G.. 7 November 2018a. Ini Faktor MGMP tidak Berjalan Efektif, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/11/07/phtfiz335-ini-faktor-mgmp-tidak-berjalan-efektif>. diakses tanggal 14 Februari 2019.
- Awaliyah, G.. 7 November 2018b. Kebanyakan MGMP Dinilai tidak Bekerja Profesional, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/11/07/phtfiz335-ini-faktor-mgmp-tidak-berjalan-efektif>. diakses tanggal 14 Februari 2019.
- Awaliyah, G.. 7 November 2018c. Ikatan Guru: Sulit Harapkan MGMP dalam Penerapan Zonasi, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/11/07/phtfiz335-ini-faktor-mgmp-tidak-berjalan-efektif>. diakses tanggal 14 Februari 2019.

- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2015. Data Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). 2010. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP.
- Fatah, A. 2018. Problematika Pendidikan Di Daerah Terpencil. https://www.researchgate.net/publication/328925930_Problematika_Pendidikan_Di_Daerah_Terpencil. diakses tanggal 12 Maret 2019.
- Firman. 2016. Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan. *Jurnal Sains Terapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan*. Balikpapan, Volume 2, No. 1, 27-33.
- Hermanto, R. dan Santika, S. 2016. Analisis Hasil Uji Kompetensi Guru Matematika Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi*. Tasikmalaya, Volume 2, No. 2, 135 – 142.
- Husna, F. 2016. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI: Studi Kasus MGMP PAI SMP Negeri Kabupaten Kediri. *Jurnal Didaktika Religia Pascasarjana STAIN Kediri*. Kediri, Volume 4, No. 2, 205-224.
- Idhom, A. M. 2017. Pelatihan Pembuatan Soal USBN akan Habiskan Rp 320 Miliar. <https://tirto.id/pelatihan-pembuatan-soal-usbn-akan-habiskan-rp320-miliar-ckg7>. diakses tanggal 4 Februari 2019.
- Mahmud, I. 2013. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru SMA di Kota Batu. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Rahayu, M., Ulfatin, N. & Juharyanto, J. 2018. Sistem Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang*. Malang, Volume 1 No. 3, 263-269.
- Ridwan. 2014. Upaya-Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran*. Semarang, Volume 2 No. 1, 83-95.
- Senewe, F.P. dan Elsi, E. 2014. Analisis Deskriptif Kesehatan Lingkungan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan Dan Terpencil (DTPK-T). *Jurnal Media Litbangkes Kemenkes RI*. Jakarta, Volume 24 No. 3, 153-160.
- Suardi, F. 2016. Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah*. Makassar, Volume IV, No. 2, 203-212.
- Suharso, Y. 2013. Peran dan Tanggungjawab Guru Sebagai Tenaga Profesional. *Majalah Ilmiah Pawiyatan FPIPS IKIP Veteran*. Semarang, Volume XX No. 4, 112-123.
- Yunus, M. 2016. Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Lentera Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI*. Pinrang, Volume 19 No.1, 112-128.